



RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2020



**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA DENPASAR
TAHUN 2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa karena atas berkatNya Penyusunan Rencana Kerja (renja) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Tahun 2020 dapat diselesaikan.

Renja Bapenda Kota Denpasar merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Bapenda Kota Denpasar 2016 - 2021 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan yang ada adalah usulan dari semua bidang yang ada pada Bapenda Kota Denpasar, sesuai dengan tugas pokok serta fungsi dari Bapenda Kota Denpasar.

Dengan tersusunnya renja ini, diharapkan dapat memandu pelaksanaan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja Bapenda Kota Denpasar.

Denpasar, 05 Agustus 2019

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar



I Dewa Nyoman Semadi, SE, M Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 199011 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah	8
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah.....	16
2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD	17
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat...	23
BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH....	24
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	24
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana kerja Badan Pendapatan Daerah.....	24
3.3 Program dan Kegiatan	25
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH.....	31
BAB V PENUTUP.....	32
Lampiran	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) OPD. Substansi Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar mengacu kepada RPJMD dan RKPD serta memuat rancangan program dan kegiatan, pendanaannya, baik yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar maupun berbagai pemangku kepentingan lainnya sebagai wujud dari pola perencanaan partisipatif. Rencana Kerja memuat kebijakan publik dan arah kebijakan selama setahun, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang harus dilaksanakan secara konsisten.

Tahun 2020 merupakan pelaksanaan tahun keempat dari periode kepemimpinan Walikota Denpasar Tahun 2016 - 2021 oleh karena itu dalam penyusunan Renja Tahun 2020 merupakan penjabaran dari skema RPJM Daerah 2016 - 2021 atau sebagai tindak lanjut dari RKPD Tahun 2020 serta Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021. Penyusunan Renja Tahun 2020 Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar berpedoman pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025, memperhatikan hasil kinerja pembangunan yang dicapai pada tahun sebelumnya, fenomena yang ada, isu strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan Rencana Kerja, mempertimbangkan sinergitas antar sektor dan antar wilayah, serta memperhatikan azas koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta berbagai pihak, baik politisi,

teknokrat, tokoh masyarakat maupun para pemangku kepentingan lainnya.

Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dilaksanakan dengan memperhatikan Visi Kota Denpasar yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan Visi

“Denpasar Kota Berbudaya Dilandasi Tri Hita Karana”

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021 dengan Visi

“Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan menuju Keharmonisan ”

Sedangkan **Misi** Kota Denpasar adalah:

1. Penguatan jati diri masyarakat Kota Denpasar berlandaskan budaya Bali.
2. Memberdayakan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal melalui budaya kreatif.
3. Peningkatan pelayanan public melalui tata kelola pemerintahan yang baik (good govermance) berdasarkan penegakan supremasi hukum (low enforcement)
4. Peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat Kota Denpasar dengan bertumpu pada kerakyatan.
5. Penguatan keseimbangan pembangunan pada berbagai dimensi dan skalanya berdasarkan Tri Hita Karana

Mengacu kepada visi dan misi Kota Denpasar, maka Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kota Denpasar, maka tugas pokok dan fungsinya adalah:

“Mengkoordinasikan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta merealisasikannya bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah penghasil PAD, untuk selanjutnya dapat dipergunakan untuk membiayai belanja Pemerintah Kota Denpasar yang telah ditetapkan”

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah sebagai berikut:

1. Undang – undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagai diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Peran gkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesias Tahun 2015 Nomor 3);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
17. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun

2016 – 2021 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 3);

18. Peraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli, Sekeretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat, BadanDaerah dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 43);
19. Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2020 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor0 40);

1.3 Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar adalah untuk memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2020 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

1.4 Sistematika Penulisan

Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2020, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan dan penganggaran tahunan, disusun dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018

Pada bab ini menjelaskan mengenai Evaluasi pelaksanaan renja tahun 2018 dan capaian renstra Badan Pendapatan Daerah, Analisa kinerja pelayanan Badan Pendapatan Daerah, Isu-isu penting penyelenggaran tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah, Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Pada bab ini menjelaskan mengenai telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Badan Pendapatan Daerah, Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA PENDANAAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2018

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan Capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah

Evaluasi Pelaksanaan renja merupakan kegiatan yang bersifat regular dan rutin yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengetahui sampai sejauh mana komitmen, kemampuan, hambatan dan permasalahan yang dihadapi OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan, merealisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra OPD yang didasarkan atas laporan hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun – tahun sebelumnya, laporan evaluasi pelaksanaan Renstra OPD dan prakiraan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA - OPD) tahun berjalan.

Untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektifitas anggaran, maka dalam menyusun perencanaan anggaran perlu menetapkan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat serta indikator kinerja yang ingin dicapai. Indikator kinerja merupakan media atau sarana dalam mengukur pengeluaran dengan kinerja yang dihasilkan sehingga penetapan ukuran atau indikator kinerja merupakan salah satu unsur penting dalam penyusunan anggaran dengan metode penganggaran berbasis Acrual. Penganggaran berbasis Acrual merupakan suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang dilakukan organisasi dengan menggunakan informasi kinerja yang diharapkan dapat menjadi acuan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar dalam menyusun program kegiatan.

Pada Tahun 2018 Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar telah melaksanakan program/kegiatan untuk mewujudkan sasaran yang ingin dicapai dengan gambaran sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dalam Pelaksanaan program/kegiatan, secara keseluruhan sudah dapat dilaksanakan, namun ada dua kegiatan yang belum mencapai

target yang diharapkan yaitu Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Pembuatan Aplikasi Online.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dalam melaksanakan program/kegiatan yang dilaksanakan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar tahun 2018 target kinerja yang telah ditetapkan dapat direalisasikan sebesar 87% fisik dengan realisasi anggaran mencapai 78.62%.

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja yang ditetapkan adalah : Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dimana outcome yang ingin dicapai yaitu Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli daerah ditargetkan sebesar Rp. 766.572.844.718,69 dengan realisasi sebesar Rp. 946.408.554.141,11 atau 123,46%.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan

Karena adanya ketidak sesuaian terhadap diklat yang ditawarkan dengan kebutuhan Badan Pendapatan Daerah.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi atau akibat langsung yang dapat ditimbulkan dari target yang telah ditetapkan yaitu, untuk menunjang pendanaan belanja langsung dan tidak langsung dalam rangka pembangunan di Kota Denpasar.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

mengikuti diklat/ pelatihan-pelatihan bagi aparatur yang berkaitan dengan pajak daerah

Evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sampai dengan tahun 2018 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Renstra Sampai Dengan Tahun 2019
Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Badan Pendapatan Daerah s/d tahun 2019		
					Target Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7 / 6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)	
1	Urusan Pemerintahan										
1	01	Badan Pendapatan Daerah									
1	01	01	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1	01	01	01	019	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Badan Pendapatan Daerah s/d tahun 2019	
					Target Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 01 01 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
1 01 01 02 011	Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor	100%	100%	77 Unit 14 Unit 12 Bulan	77 Unit 14 Unit 12 Bulan	100% 100% 100%	77 Unit 14 Unit 12 Bulan	77 Unit 14 Unit 12 Bulan	100% 100% 100%
1 01 01 05	Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	100%	50%	100%	25%	25%	100%	100%	100%
1 01 01 05 004	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan	100 %	50%	8	2	25%	8	8	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Badan Pendapatan Daerah s/d tahun 2019					
					Target Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	01	01	15		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Rp. Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	835.037.984.248,28	1.008.694.194.670,60	766.572.844.718,69	946.408.554.141,11	123,46%	781.639.810.300,38	781.639.810.300,38	100%
						Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah	44 %	-	-	-	-	42 %	42 %	100%
						Jumlah terlatihnya Aparatur	84	-	81	81.04	100.05%	82	82	100.05%
1	01	01	15	019	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah	Jumlah terlatihnya Aparatur	40 Aparatur							
						Jumlah Wajib Pajak yang Diaudit	159 Wp	100%	45Wp	45Wp	100%	45Wp	45Wp	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Badan Pendapatan Daerah s/d tahun 2019	
					Target Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 01 01 15 020	Pelayanan PBB	Laporan Hasil Pendampingan Pendaerahan PBB sektor Perkotaan Kota Denpasar	5 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%
1 01 01 15 022	Penyampaian Data dan Informasi Sistemn Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyebaran Brosur Pajak Daerah dalam rangka HUT Kota Denpasar	3.000 Brosur	100%	900 Brosur	900 Brosur	100%	700 Brosur	700 Brosur	100%
1 01 01 15 023	Pembuatan Aplikasi Online	Sistem Aplikasi	2 Aplikasi	100%	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	-	-	-
1 01 01 15 034	Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Daerah	Dokumen Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pajak Daerah	4 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2016 s/d 2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2018			Target program dan kegiatan (Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Badan Pendapatan Daerah s/d tahun 2019	
					Target Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018	Realisasi Renja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2019	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1 01 01 15 035	Pendampingan Potensi Pajak Daerah	Dokumen Potensi Pajak NPAT Dokumen Kajian Akademis NPAT	2 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100%	-	-	-
1 01 01 15 036	Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Penerimaan Pajak Daerah	Pengembangan Sistem Informasi Pelaporan Penerimaan Pajak Daerah	1 Aplikasi	-	1 Aplikasi	1 Aplikasi	100%	-	-	-
1 01 01 15 040	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Tapping Box yang terpasang pada Wajib Pajak	225 Tapping box	-	-	-	-	85 Tapping box	85 Tapping box	100%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah

Dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar, secara umum telah menunjukkan kinerja yang baik. Hal tersebut berdasarkan pada analisis pengukuran kinerja kegiatan dengan realisasi fisik sampai dengan tahun 2018 mencapai 87% dengan realisasi keuangan mencapai 78,62%, sedangkan dari sisi pencapaian indikator kinerja utama yaitu Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah terpencapai diatas 100% berdasarkan hal tersebut dapat artikan bahwa apa yang menjadi tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar sudah sesuai dengan apa yang direncanakan.

Adapun analisa pencapaian kinerja Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar

No	Sasaran	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Rp.	766.572.844.718,69	781.639.810.300,38	797.582.007.910,10	840.037.984.248,28	946.408.554.141,11	-	797.582.007.910,10	835.037.984.248,28	
		Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	42 %	43 %	44 %	-	-	43 %	44 %	
2	Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah	81	82	83	84	81.04	-	83	84	

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra, maka dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan

atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dirumuskan sebagai berikut :

- Peningkatan pelayanan masyarakat, dalam rangka mengantisipasi dinamika akselerasi reformasi yang demikian cepat sering berbenturan dalam memandang kewajiban selaku masyarakat, juga perlu dikaji lebih mendalam guna menyikapi berbagai opini dan benturan yang terjadi dalam pelayanan yang diberikan kepada masyarakat,
- Pembinaan terhadap Wajib Pajak melalui pendidikan dan pelatihan atau bimbingan teknis dan pengawasan terhadap bentuk – bentuk usaha yang khususnya terkait dengan Pajak Daerah
- Menjaga kestabilan dan keamanan ketertiban di Wilayah Kota Denpasar disamping adanya *Ketidak Pastian* berkaitan kondisi global yang mempengaruhi kunjungan wisatawan asing dan domestik menyebabkan pluktuasinya penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Salah satu tujuan dilakukannya review terhadap Rancangan Awal RKPD adalah untuk menghindari inkonsistensi substansi renja Badan Pendapatan Daerah dengan berbagai rumusan yang sudah tertuang dalam Rancangan Awal RKPD, karena pada hakikatnya renja tersebut disusun untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan serta target program dan kegiatan yang sudah dirumuskan dalam Rancangan Awal RKPD. Pada akhirnya, renja juga akan mengalami penyempurnaan setelah Rancangan awal RKPD tersebut sudah ditetapkan menjadi RKPD.

Hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dalam kaitannya dengan analisis kebutuhan renja.

Badan Pendapatan Daerah disajikan dalam Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020
Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Urusan Pemerintahan										
	Badan Pendapatan Daerah				9.942.233.741,52					9.942.233.741,52	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bapenda	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	100%	6.164.534.620	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bapenda	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	100%	6.164.534.620	
	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bapenda	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	6.164.534.620	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bapenda	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	6.164.534.620	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bapenda	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1.316.154.121,52	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bapenda	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	1.316.154.121,52	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bapenda	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor	77 Unit 14 Unit 12 Bulan	1.316.154.121,52	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bapenda	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor	77 Unit 14 Unit 12 Bulan	1.316.154.121,52	
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bapenda	Persentase ASN Yang Mengikuti Bimtek	10%	107.000.000	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bapenda	Persentase ASN Yang Mengikuti Bimtek	10%	107.000.000	
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bapenda	Jumlah ASN yang Mengikuti Bintek	8 Orang	107.000.000	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Bapenda	Jumlah ASN yang Mengikuti Bintek	8 Orang	107.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
4	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bapenda	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Rp. Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah	797.582.007.910,10 43 % 83	2.354.545.000	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Bapenda	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Rp. Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah	797.582.007.910,10 43 % 83	2.354.545.000	
	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Bapenda	Jumlah Wajib Pajak PHR yang Dilakukan Audit	45 WP	271.650.000	Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Bapenda	Jumlah Wajib Pajak PHR yang Dilakukan Audit	45 WP	271.650.000	
	Pelayanan PBB	Bapenda	Laporan Hasil pendampingan Pendaerahan PBB Sektor Perkotaan Kota Denpasar	1 Laporan	419.135.000	Pelayanan PBB	Bapenda	Laporan Hasil pendampingan Pendaerahan PBB Sektor Perkotaan Kota Denpasar	1 Laporan	419.135.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Penyampaian data dan informasi sistem pengelolaan Keuangan Daerah (Promosi / Pameran)	Bapenda	Penyebaran Brosur Pajak Daerah Dalam HUT Kota Denpasar	700 Brosur	17.750.000	Penyampaian data dan informasi sistem pengelolaan Keuangan Daerah (Promosi / Pameran)	Bapenda	Penyebaran Brosur Pajak Daerah Dalam HUT Kota Denpasar	700 Brosur	17.750.000	
	Pembuatan Aplikasi Online	Bapenda	Sistem Aplikasi Pendataan dan Mapping Wajib Pajak Daerah Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah Terpadu	2 Aplikasi	482.760.000	Pembuatan Aplikasi Online	Bapenda	Sistem Aplikasi Pendataan dan Mapping Wajib Pajak Daerah Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah Terpadu	2 Aplikasi	482.760.000	
	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Tapping Box yang Terpasang pada Wajib Pajak	75 Tapping Box	879.000.000	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Tapping Box yang Terpasang pada Wajib Pajak	75 Tapping Box	879.000.000	
	Bimbingan Teknis Standar akuntansi Pembukuan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Aparatur yang memahami Standar Akutansi Pembukuan Pajak Daerah	15 Orang	9.780.000	Bimbingan Teknis Standar akuntansi Pembukuan Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah Aparatur yang memahami Standar Akutansi Pembukuan Pajak Daerah	15 Orang	9.780.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indukatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan PAD	Bapenda	Dokumen Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Dokuman	10.830.000	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan PAD	Bapenda	Dokumen Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1 Dokuman	10.830.000	
	Validasi dan Verifikasi Ruang Hijau Terbuka Kota (RTHK)	Bapenda	Laporan Jumlah Wajib Pajak yang Objeknya ditetapkan sebagai Ruang Hitaju Terbuka Kota (RTHK)	4500 WP	21.000.000	Validasi dan Verifikasi Ruang Hijau Terbuka Kota (RTHK)		Laporan Jumlah Wajib Pajak yang Objeknya ditetapkan sebagai Ruang Hitaju Terbuka Kota (RTHK)	4500 WP	21.000.000	
	Optimalisasi Potensi Wajib Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah potensi Wajib Pajak Baru	150 Wajib Pajak	242.640.000	Optimalisasi Potensi Wajib Pajak Daerah	Bapenda	Jumlah potensi Wajib Pajak Baru	150 Wajib Pajak	242.640.000	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Di era reformasi birokrasi saat ini, proses perencanaan tidak hanya dilakukan secara *top down* akan tetapi juga secara *bottom up* artinya pihak pemerintah juga harus dapat mengakomodir usulan dari masyarakat terkait rencana pembangunan daerah melalui proses Musrenbang. Sehingga dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020 juga perlu mengakomodir berbagai usulan dari para *stakeholders* seperti masyarakat selain program dan kegiatan yang telah dirumuskan oleh Badan Pendapatan Daerah terkait rencana pencapaian target RPJMD Kota Denpasar dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2016-2021.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Visi, Misi Strategis dan Permasalahan Pembangunan lima tahun kedepan maka arah kebijakan pada RPJMD tahun 2016 - 2021 Kota Denpasar merupakan pencapaian lebih kongkrit dari strategi yang telah dipilih dan merupakan akselerasi dari pencapaian sasaran Milinium Development Gold (MDG's), sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Bali serta kebijakan pada masing-masing sasaran misi pembangunan Kota Denpasar. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang memiliki sasaran meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui potensi sumber-sumber pendapatan.

Berjalannya roda pemerintahan sangat tergantung dari adanya sumber dana yang memadai. Sumber dana penyelenggaraan pemerintah ini adalah Pendapatan Asli Daerah, yang banyak disumbangkan dari Pajak Daerah. Kondisi ekonomi yang masih belum baik dan adanya isu negatif yang bersifat sosial dan ekonomi juga mempengaruhi pluktuasinya penerimaan pendapatan asli daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pendapatan Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran renja didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD. Berikut adalah tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Badan Pendapatan Daerah adalah :

Tujuan

- Meningkatnya sumber-sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
- Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah.

Sasaran

- Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah.
- Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Pajak Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Program selalu berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan tertentu sebagaimana ditetapkan dalam strategi. Dalam menetapkan program telah dipertimbangkan “siapa melakukan apa” dan jangka waktu penyelesaiannya. Dengan demikian program adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan. Kegiatan merupakan titik awal tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam mewujudkan visi dan misi Kota Denpasar.

Untuk mewujudkan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 maka program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pendapatan Daerah Tahun 2020
Dan Perkiraan Maju Tahun 2021

Badan Pendapatan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiat an (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indukatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indukatif (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Urusan Pemerintahan											
1	Badan Pendapatan Daerah				9.942.233.741,52				10.544.496.293			
1	01											
1	01	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran	Bapenda	100%	6.164.534.620		100%	6.452.541.543
1	01	01	01	019	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Bapenda	100%	6.164.534.620		100%	6.452.541.543

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiat an (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indukatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indukatif (Rp)
1	01	01	02		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	01	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur	Bapenda	100%	1.316.154.121,52				2.018.614.500
1	01	01	02	011	Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur	Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 Pemeliharaan Kendaraan Roda 4 Pengadaan dan Pemeliharaan Peralatan Kantor	Bapenda	14 Unit 77 Unit 12 Bulan	1.316.154.121,52			14 Unit 77 Unit 12 Bulan	2.018.614.500
1	01	01	05		Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase ASN yang mengikuti Bimtek	Bapenda	10%	107.000.000			10%	107.000.000
1	01	01	05	004	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan	Bapenda	8 Orang	107.000.000			8	107.000.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiat an (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indukatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indukatif (Rp)
1	01	01	15		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	01	15		Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Rp. Persentase Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Pajak Daerah		797.582.007. 910,10 43 % 83	2.354.545.000			835.037.984.2 48,28 44 % 84	1.966.340.250
1	01	01	15	019	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah	Jumlah Wajib Pajak PHR yang Dilakukan Audit	Bapenda	45 WP	271.650.000			45 WP	283.027.500
1	01	01	15	001	Pelayanan PBB	Laporan Hasil pendampingan Pendaerahan PBB Sektor Perkotaan Kota Denpasar	Bapenda	1 Laporan	419.135.000			1 Laporan	440.091.750

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiat an (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indukatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indukatif (Rp)
1	01	01	15	022	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	01	15	022	Penyampaian Data dan Informasi Sistemn Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Brosur yang disebar kan Jumlah Pengunjung stand pameran	Bapenda	700 Brosur 150 Pengunjung	17.750.000			700 Brosur 150 Pengunjung	32.077.500
1	01	01	15	023	Pembuatan Aplikasi Online	Sistem Aplikasi Pendataan dan Masing Wajib Pajak Daerah Sistem Informasi Pelayanan Pajak Daerah Terpadu	Bapenda	2 Aplikasi	482.760.000			-	-
1	01	01	15	040	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	Jumlah Tapping Box yang Terpasang pada Wajib Pajak	Bapenda	75 Tapping Box	879.000.000			75 Tapping Box	922.950.000
1	01	01	15	044	Bimbingan Teknis Standar akuntansi Pembukaan Pajak Daerah	Jumlah Aparatur yang memahami Standar Akuntansi Pembukuan Pajak Daerah	Bapenda	15 Orang	9.780.000			-	-
1	01	01	15	046	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan PAD	Dokumen Laporan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Bapenda	1 Dokuman	10.830.000			1 Dokuman	11.371.500

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiat an (output)	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indukatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indukatif (Rp)
1	01	01	15	047	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	01	01	15	047	Validasi dan Verifikasi Ruang Hijau Terbuka Kota (RTHK)	Laporan Jumlah Wajib Pajak yang Objeknya ditetapkan sebagai Ruang Hitaju Terbuka Kota (RTHK)	Bapenda	4.500 Wajib Pajak	21.000.000			4.500 Wajib Pajak	22.050.000
1	01	01	15	048	Optimalisasi Potensi Wajib Pajak Daerah	Jumlah potensi Wajib Pajak Baru	Bapenda	150 Wajib Pajak	242.640.000			200 Wajib Pajak	254.772.000

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Rencana kerja merupakan proses penyusunan Rencana Kerja yang memuat program dan kegiatan yang dipergunakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar yang akan dilaksanakan oleh masing – masing bidang dan sekretariat Badan Pendapatan Daerah.

Untuk mencapai sasaran dan Tujuan yang sebagaimana yang telah ditetapkan, adapun Rencana Kerja yang akan di lakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 adalah sebagai berikut :


Tabel 4.1
Usulan Kegiatan yang akan dilaksanakan
Tahun Anggaran 2020

Sekretariat / Bidang	Kegiatan	Anggaran
Sekretariat	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 6.164.534.620
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 1.316.154.121,52
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 107.000.000
	Sub Total	Rp. 7.587.688.741,52
Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan	Pelayanan PBB	Rp. 419.135.000
	Pembuatan Aplikasi Online	Rp. 482.760.000
	Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah	Rp. 879.000.000
	Optimalisasi Potensi Wajib Pajak Daerah	Rp. 242.640.000
	Sub Total	Rp. 2.023.535.000
Penagihan dan Kebaratan	Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber Pendapatan Daerah	Rp. 271.650.000
	Penyampaian data dan informasi sistem pengelolaan keuangan Daerah (promosi/pameran)	Rp. 17.750.000
	Validasi dan Verifikasi Ruang Hijau Terbuka Kota (RTHK)	Rp. 21.000.000
	Sub Total	Rp. 310.400.000
Pembukuan Dan Pelaporan	Bimbingan Teknis Standar akuntansi Pembukuan Pajak Daerah	Rp. 9.780.000
	Monitoring dan Evaluasi Pelaporan PAD	Rp. 10.830.000
	Sub Total	Rp. 20.610.000
TOTAL		Rp. 9.942.233.741,52

BAB V PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 disusun dengan kebutuhan Pendanaan Sebesar Rp. 9.942.233.741,52 (sepuluh milyar lima ratus empat puluh juta dua belas ribu enam ratus enam puluh) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang akan direncanakan pada tahun 2020, dengan harapan dapat membantu pencapaian target Pendapatan yang menjadi tanggung jawab Badan Pendapatan Kota Denpasar yang akhirnya dapat dipergunakan untuk membiayai Tugas Umum Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Denpasar, 05 Agustus 2019
Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kota Denpasar



I Dewa Nyoman Semadi, SE, M Si,
Pembina Utama Muda
NIP. 19641231 199011 1 008

LAMPIRAN - LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA DENPASAR

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Letda Tantular No. 12 Denpasar
Telp. (0361) 239079, 239080 Fax. (0361) 261246

BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 28 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2020

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah dirumahnya beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1213);
14. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 5);
16. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
17. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.


KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim penyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu adalah:

1. Mengkaji dan mengevaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar;
2. Mengidentifikasi dan Merumuskan isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah
3. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengelola usulan Program dan kegiatan masyarakat Tahun 2020
4. Menyusun program kerja dan kegiatan Tahun 2020 dengan berpedoman pada Renstra Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar 2016 - 2021

- KETIGA : Tim Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2020, bertanggung jawab terhadap penyusunan Renja Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar Tahun 2020;
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 03 Desember 2018

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA DENPASAR



I DEWA NYOMAN SEMADI, SE., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641231 199011 1 008

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA
DENPASAR

NOMOR : 28 TAHUN 2018

TANGGAL : 03 DESEMBER 2018


TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA
KERJA (RENJA) BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA DENPASAR TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) BADAN
PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2020

- Ketua : Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
- Sekretaris : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
- Anggota : - Kepala Bidang Pembukuan dan pelaporan Badan
Pendapatan Daerah Kota Denpasar
- Kepala Bidang Penagihan dan Keberatan Badan
Pendapatan Daerah Kota Denpasar
- Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan
Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
- Para Kasubid/Kasubag Badan Pendapatan Daerah Kota
Denpasar

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 03 Desember 2018

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KOTA DENPASAR


I DEWA NYOMAN SEMADI, SE., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641231 199011 1 008